

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

No.	Judul	Nama peneliti	Fokus Kajian	Hasil Penelitian
1.	HMI dan Kekuasaan (2006)	Sidratahta Mukhtar	Fokus kajian pada penelitian ini adalah guna menelusuri sejauh mana perkembangan HMI yang berkaitan dengan politik, serta pemikiran-pemikiran yang berkembang tentang HMI dan memiliki erat kaitannya dengan pemikiran politik, hingga pembahasan mengenai kader yang telah dihasilkan organisasi HMI.	HMI memiliki peran yang cukup signifikan didalam kekuasaan meskipun HMI bukan sebuah organisasi politik tetapi memiliki tingkat partisipasi yang cukup besar baik di dalam maupun diluar kekuasaan, tetapi hal inilah yang justru mengikis pemikiran-pemikiran HMI yang sebenarnya.

2.	Dibawah naungan khittah perjuangan HMI (2018)	Mhd Zakiul Fikri	Fokus kajian dalam penelitian ini berada pada wawasan- wawasan islam serta ke HMI- an yang menjadi modal pembelajaran para kader dalam mempelajari Khittah Perjuangan HMI yang lekat dengan keislaman.	Khittah perjuangan HMI bukanlah sebuah pedoman bagi setiap kader HMI saja tetapi dapat menjadi sebuah pedoman untuk umat islam, manusia dalam berkehidupan di alam semesta karena khittah perjuangan HMI tidak pernah terlepas dari kitabsuci Al-Qur'an yang mengajarkan kehidupan termasuk dalam bernegara sehingga peran HMI pun sangat penting terutama sebagai organisasi pembebasan.
----	---	------------------	--	---

Kegunaan dari penelitian terdahulu yang relevan bagi penelitian ini adalah untuk mencari sebuah persamaan serta perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti pada saat ini.

Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan juga dapat digunakan sebagai perbandingan antara penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang sedang dilakukan penelitian ini berupa sebuah tulisan yang di muat kedalam bentuk buku serta jurnal yang penulisan buku tersebut dilakukan oleh Sidratahta Mukhtar (2006), Mhd. Zakiul Fikri (2018).

Buku karya dari Sidrahta Mukhtar dengan judul “HMI dan Kekuasaan” secara garis besar memiliki fokus kajian pada penelitian yang menelusuri sejauh mana perkembangan HMI yang berkaitan dengan politik, serta pemikiran-pemikiran yang berkembang tentang HMI dan memiliki erat kaitannya dengan pemikiran politik karena pada hakikatnya HMI bukanlah organisasi yang berafiliasi terhadap pemerintahan melainkan adalah organisasi perjuangan dan organisasi kader yang menciptakan para kader dengan kualitas yang tinggi sehingga mampu memberikan manfaat serta pengaruh yang baik dan cukup besar di masyarakat, penelitian yang dibuat dalam sebuah buku ini juga sampai kepada pembahasan mengenai kader-kader yang telah dihasilkan organisasi HMI dan mampu memiliki karir politik yang cemerlang serta sangat memiliki peran signifikan dalam pemerintahan Indonesia.

Hasil dari penelitian tersebut adalah tentang HMI yang memiliki peran cukup signifikan di dalam kekuasaan meskipun HMI bukan sebuah organisasi politik tetapi memiliki tingkat partisipasi yang cukup besar baik di dalam maupun diluar kekuasaan seperti dari para kader yang merupakan mahasiswa aktif di perguruan tinggi maupun para alumni HMI yang banyak berkecimpung

di dalam politik tetapi hal inilah yang justru mengikis pemikiran-pemikiran HMI yang sebenarnya karena kecenderungan lebih berpihak kepada pemerintah dan seakan lupa akan misi serta tujuan dari dibentuknya organisasi Himpunan Mahasiswa Islam tersebut.

Penelitian lainnya tertuang dalam sebuah buku karya dari Mhd Zakiul Fikri yang berjudul “Dibawah naungan khittah perjuangan HMI” yang diterbitkan pada tahun 2018 ini membahas tentang wawasan-wawasan islam serta ke HMI-an yang menjadi modal pembelajaran bagi setiap kader himpunan dalam mempelajari Khittah Perjuangan HMI yang lekat dengan keislaman dengan inti dari pembahasan dalam buku tersebut adalah menjelaskan bahwa khittah perjuangan HMI bukanlah sebuah pedoman bagi setiap kader HMI saja tetapi dapat menjadi sebuah pedoman untuk umat islam, manusia dalam berkehidupan di alam semesta karena khittah perjuangan HMI tidak pernah terlepas dari kitab suci Al-Qur’an yang mengajarkan kehidupan termasuk dalam bernegara sehingga peran HMI pun sangat penting terutama sebagai organisasi pembebasan.

Khittah perjuangan yang menjelaskan arah dan tujuan yang seharusnya menjadi acuan bagi segenap kader HMI akan selalu menjadi landasan pergerakan organisasi tersebut karena tanpa adanya sebuah landasan mengenai apa yang diperjuangkan dan apa yang menjadi tujuan utama dalam sebuah organisasi maka sebuah organisasi tersebut akan berjalan dengan tanpa arah tujuan yang jelas sehingga khittah perjuangan HMI yang terangkum dalam buku tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perjuangan HMI dalam kehidupan masyarakat yang

senantiasa selalu bersinggungan dengan keadaan sosial politik yang terjadi di kehidupan masyarakat pada umumnya.

Persamaan antara penelitian penulis kali ini dengan penelitian terdahulu karya Sidratahta Mukhtar dan Mhd Zakiul Fikri adalah sama-sama berfokus pada organisasi HMI yang memiliki pemikiran-pemikiran perjuangannya mengenai keislaman dan kebangsaan yang membuat HMI memiliki peran yang signifikan bagi umat maupun bagi negara dalam sebuah kekuasaan dimana fokus peneliti kali ini mengenai fungsi kontrol sosial HMI terhadap pelaksanaan Pilkada tahun 2020 guna menciptakan atmosfer pemerintahan yang sempurna terutama pada tingkat daerah yang melaksanakan Pilkada di tahun 2020 terlebih dalam kondisi masyarakat yang terganggu dalam segi kesehatan, sosial, dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Perbedaan antara penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana peneliti mengkaji peran nyata yang dimiliki setiap kader-kader HMI terhadap sebuah kebijakan dan masuk kedalam dimensi perpolitikan yang lebih dalam karena mengkaji peran penting dari fungsi kontrol sosial yang dilakukan terhadap sebuah kebijakan dan menggambarkan secara jelas bagaimana pandangan serta sikap yang dikeluarkan HMI terkait kebijakan yang dihasilkan dari jalannya pemerintahan agar dapat menciptakan masyarakat adil makmur.

2.2 Kerangka Teori

Kerangka teori akan memperjelas sebuah alur dalam proses pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian ini, kerangka teori disusun agar dapat lebih

mudah mengelompokan rujukan-rujukan teori yang akan dipakai selama penelitian berlangsung dan akan menjadi panduan utama dalam mendapatkan hasil penelitian yang baik.

2.2.1 Teori Kepemimpinan Politik

Studi kepemimpinan politik pada dasarnya adalah meneliti bagaimana perilaku pemimpin politik secara individual dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan serta bagaimana perilaku tersebut dapat mempengaruhi tipe keputusan yang diambil, kepemimpinan tidak akan terlepas dari sosok pemimpin yang mampu menaungi seluruh anggotanya dengan wibawa, keberanian, sikap dan pemikiran-pemikiran yang mampu berikan perubahan positif bagi orang-orang di sekelilingnya terlebih disaat sebuah lingkungan maupun organisasi yang di pimpin terjadi sebuah masalah maka yang dapat menuntaskan setiap masalah tersebut adalah pemimpinnya.

Salah satu teori dalam kepemimpinan adalah Teori *Trait* sekitar tahun 1940, yang menjelaskan perbedaan antara pemimpin dan pengikutnya karena pemimpin memiliki kualitas tinggi daripada pengikutnya, kualitas ini dapat berupa kecerdasan, kekuatan, dan ketangkasan diatas mayoritas.¹ Jadi pengikut dari pada pemimpin tersebut telah menyetujui dan sepakat bahwa seluruh kehidupan para pengikut atau masyarakat akan dipegang penuh dan senantiasa mengikuti setiap alur yang dibuat oleh pemimpinnya.

⁹ Eko Prasetyo, Skripsi: "Demokrasi dan Problem Kepemimpinan Politik di Indonesia" (Jakarta:UIN,2013), Hal. 26

Analisis studi kepemimpinan politik dapat juga dilakukan dengan analisis beberapa faktor variable yang mempengaruhi pemimpin politik dalam membuat sebuah keputusan politik, studi kepemimpinan politik ini dapat dilakukan pada Presiden, perdana menteri atau bahkan sampai kepada pimpinan organisasi politik seperti sekretaris jenderal Partai Politik dan lainnya. Dalam sebuah studi kepemimpinan politik terdapat sebuah variable yang mempengaruhi kepemimpinan politik dengan terdapat tiga komponen di dalamnya yang mempengaruhi kepemimpinan tokoh dalam membuat keputusan yaitu:

1) Motif

Motif pemimpin untuk bertindak di dorong oleh 3 motif utama yaitu motif kebutuhan akan kekuasaan, motif prestasi, serta motif afiliasi dengan orang lain. Ketiga motif tersebut saling memiliki keterkaitan antar satu sama lainnya maka motif akan sangat berpengaruh terhadap pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan strategis.

2) Kognisi dan Keyakinan

Mencakup bagaimana pemimpin dapat menginterpretasikan, menyusun dan mengambil sebuah informasi, serta keyakinan umum pemimpin tentang sifat politik dan dunia pada umumnya. Keyakinan akan kemampuan dirinya dalam membawa perubahan kearah yang lebih baik.

3) Sifat

Sifat berkaitan dengan bagaimana karakter pemimpin seperti bagaimana keramahan seorang pemimpin, selalu berhati-hati, serta keterbukaan atas sebuah pengalaman baru.

Perilaku kepemimpinan politik terdapat fokus studi kepemimpinan politik yang memiliki dua fokus utamanya yaitu:

1) Tipologi kepribadian pemimpin politik

Tipologi kepemimpinan politik seperti menggambarkan pemimpin otoriter atau pemimpin demokrat.

2) Faktor yang mempengaruhi perilaku seorang pemimpin politik

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemimpin tersebut dapat berasal dari lingkungan politik di sekitarnya, seperti sistem politik, sistem budaya, sistem media massa, serta sistem ekonomi. Faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah lingkungan sosial politik yang langsung, seperti keluarga, agama, dan kelompok

2.2.2 Teori Civil Society

Civil society atau masyarakat madani pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang terdapat di sebuah negara yang memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai mana mestinya sebagai warga negara dan seluruh hak-hak tersebut terlindungi oleh negara, civil society dapat pula digambarkan kepada masyarakat sipil yang tergabung dalam sebuah organisasi, asosiasi, jaringan dimana mereka secara sukarela tergabung dalam kelompok tersebut dan berusaha untuk memperjuangkan kesejahteraan umum atau memperjuangkan apa yang menjadi tujuan dari kelompoknya dibandingkan apa yang menjadi tujuan dan mengesampingkan kesejahteraan diri sendiri.

Dalam civil society masyarakat mengambil peran sepenuhnya dalam mewarnai masyarakat pada umumnya, masyarakat tidak hanya ditentukan oleh penguasa saja tetapi masyarakat juga dapat ditentukan oleh organisasi yang mana mereka tergabung di dalamnya dan sewajarnya hal tersebut juga dapat mewarnai masyarakat seutuhnya ditambah dengan banyaknya organisasi yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat akan semakin baik dengan catatan bahwa organisasi tersebut harus mampu mengangkat dirinya untuk menjadi bagian terpenting dalam struktural masyarakat.

Salah satu tujuan masyarakat sipil pada umumnya adalah harapan untuk mendapatkan kebebasan yang di jamin oleh negara sebut saja salah satunya adalah Indonesia yang bercorak sebagai negara demokrasi tentu kebebasan dan perlindungan atas hak-hak manusia dengan cara berkompromi atau lebih suka melakukan dialog-dialog dengan pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi yang tidak menginginkan sebuah perpecahan hanya karena perbedaan pendapat dan ketidak sanggupannya negara dalam memenuhi setiap kebutuhan masyarakatnya untuk menghasilkan sebuah kebijakan bersama yang bertujuan demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri karena civil society di gambarkan sebagai landasan pokok untuk terwujudnya dan ditegakkannya demokrasi yang kuat di sebuah negara dalam sistem politiknya.

Keberadaan civil society dalam masyarakat yang modern seperti dalam abad ke-21 tidak lepas dari komponen-komponen penting dari struktural dan kultural inheren didalamnya, komponen struktural merupakan komponen yang penting karena komponen tersebut termasuk terbentuknya sebuah negara yang

berdaulat, tersedianya ruang publik yang bebas sehingga masyarakat dapat menyuarakan apa yang menjadi keinginannya serta tumbuhnya ekonomi masyarakat kelas menengah yang dalam pertumbuhannya juga sangat didukung oleh keberadaan organisasi-organisasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan civil society dapat tumbuh serta bertambah kuat apabila komponen kultural yang menjadi landasannya juga kuat,

Komponen kultural adalah pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dipayungi oleh hukum yang jelas, tingkat kepercayaan publik yang tinggi terhadap sistem politik yang dijalankan oleh pemerintah, serta kuatnya komitmen masing-masing individu untuk dirinya pribadi maupun untuk kepentingan kelompoknya dalam mencapai tujuan, pada umumnya aktor utama yang menjadi dan termasuk aktor utama dalam civil society adalah partai politik serta organisasi-organisasi kemasyarakatan (perserikatan buruh, lembaga mahasiswa, dan organisasi perempuan) yang didalamnya juga termasuk salah satu organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Islam yang senantiasa berdiri berdampingan dengan masyarakat guna mencapai keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui fungsi kontrol sosial terhadap kondisi pemerintahan.

Salah satu konsep civil society yang dikemukakan oleh para ahli adalah Thomas Paine pada tahun 1792 yang menggaris besarkan civil society kepada pemahaman ruang dimana masyarakat dapat mengembangkan kepribadian serta memberikan peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa adanya sebuah paksaan dari pihak manapun. Civil society atau masyarakat madani tidak

muncul dengan sendirinya dan tentu saja terdapat sebuah unsur-unsur sosial yang menjadikan munculnya civil society tersebut, beberapa unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

1. Adanya wilayah publik yang luas

Ruang publik yang bebas sebagai sebuah sarana untuk masyarakat menyuarakan pendapatnya, semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk dapat melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut akan adanya sebuah ancaman oleh kekuatan yang berada dari luar civil society.

2. Demokrasi

Demokrasi sudah pasti adalah prasyarat mutlak bagi keberadaan civil society. Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak akan dapat terwujud begitu pula sebaliknya demokrasi tidak akan berjalan lancar apabila tidak mendapatkan dukungan secara penuh dari masyarakat. Secara umum demokrasi adalah tatanan sosial yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat.

3. Toleransi

Toleransi adalah sikap untuk saling menghargai dan menghormati segala bentuk perbedaan yang terjadi baik perbedaan pendapat maupun perbedaan dalam hal suku ataupun agama yang ada dalam masyarakat.

4. Pluralisme

Pluralisme merupakan sebuah kemajemukan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan harus disikapi dengan tulus dengan mengakui segala

kemajemukan yang terjadi sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

5. Keadilan sosial.

Keadilan sosial adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan mulai dari ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan.²

2.2.3 Konsep Peran dan Fungsi Himpunan Mahasiswa Islam

Tercantum di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Islam pada pasal 9 memiliki peran yang sangat jelas yaitu sebagai Organisasi perjuangan. Perjuangan yang dimaksud dapat berupa bagaimana setiap kader mampu menjalankan perannya sebagai mahasiswa yang senantiasa berusaha untuk mewujudkan cita-cita organisasi serta senantiasa berjuang demi kepentingan rakyat dengan harapan akan melahirkan kemajuan bagi bangsa dan negara di masa depan.

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok masyarakat sipil yang tidak dapat terlepas begitu saja di dalam peran pentingnya untuk mampu menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat, mulai dari ketertiban sosial hingga keadaan masyarakat akibat kondisi politik yang terjadi karena seringkali masyarakat terpecah akibat adanya perbedaan pandangan politik yang terjadi dan berakibat menurunnya tingkat demokrasi di Indonesia.

¹⁰ Askar Nur, Zulkifli Makmur, "Implementasi gagasan keindonesiaan himpunan mahasiswa islam: mewujudkan konsep masyarakat madani", Jurnal Khittah, vol.1 no.1 (2020), hlm 9.

Mahasiswa harus mampu menciptakan ide-ide cemerlang karena pandangan mahasiswa adalah untuk membawa kehidupan sosial masyarakat menjadi lebih baik dengan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak pemerintah, bahkan bukan hanya menyalurkan aspirasi masyarakat saja melainkan mahasiswa juga harus mampu mengeluarkan solusi-solusi terbaik yang akan diberikan kepada masyarakat dan juga pemerintah sehingga akan menghilangkan pandangan bahwa mahasiswa hanya bisa menuntut tanpa memberikan solusi yang konkrit. Mahasiswa juga dapat menjadi panutan bagi lingkungan sekitarnya dengan aktivitas sosial yang dilakukannya, biasanya terlepas dari apapun latar belakang penjurusan selama perkuliahan seorang mahasiswa akan memberikan dampak positif seperti dengan mengajar masyarakat sekitar terutama anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak meskipun dalam keadaan ekonomi yang sulit.

Luasnya peran serta fungsi kontrol sosial dalam kehidupan baik untuk masyarakat maupun negara sangat tidak dapat di pisahkan begitu saja karena dengan pendidikan yang dimiliki tentu diharapkan memiliki kecakapan yang lebih dari masyarakat lainnya, berikut adalah beberapa fungsi mahasiswa yang memiliki pengaruh cukup besar adalah:

1. Agent Of Change (Agen Perubahan)

Dengan keadaan sosial masyarakat yang multikultural dan dengan harapan masyarakat luas akan majunya negara harus didukung pula oleh pihak-pihak yang mampu memberikan terobosan-terobosan yang mampu membawa sebuah negara menjadi lebih baik tetapi cara tersebut harus

dilakukan secara baik bukan dengan kecurangan-kecurangan yang justru hanya akan merugikan negara serta masyarakat.

Sebagai Agent Of Change perubahan kearah yang lebih juga begitu besar berada di tangan mahasiswa, hanya tinggal bagaimana mahasiswa mampu menggunakan fungsi tersebut sebaik mungkin. Dan hal dasar yang paling tepat untuk menggunakan fungsi tersebut adalah dengan mampu memberikan perubahan pada diri sendiri, jika sudah mampu memberikan perubahan tersebut mahasiswa baru dianggap pantas untuk merubah nasib bangsa menjadi lebih baik.

2. Iron Stock (Penerus)

Generasi penerus sangat pantas disematkan sebagai salah satu fungsi dari mahasiswa, dengan kemampuan berfikir yang dimilikinya tentu sangat diharapkan mampu menjadi generasi penerus yang kuat serta mampu memberikan peradaban yang maju dan lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya.

3. Agent Of Social Control (Kontrol Sosial)

Peran mahasiswa sebagai social control terjadi ketika ada hal yang tidak beres atau ganjil dalam masyarakat.³ Dengan pemikiran yang kritis dan tajam mahasiswa memiliki peran yang vital dalam mengendalikan kondisi sosial di masyarakat terlebih jika mahasiswa tergabung dalam sebuah organisasi kemahasiswaan yang merupakan salah satu dari civil society membuat posisinya sebagai social control sangat kuat dengan

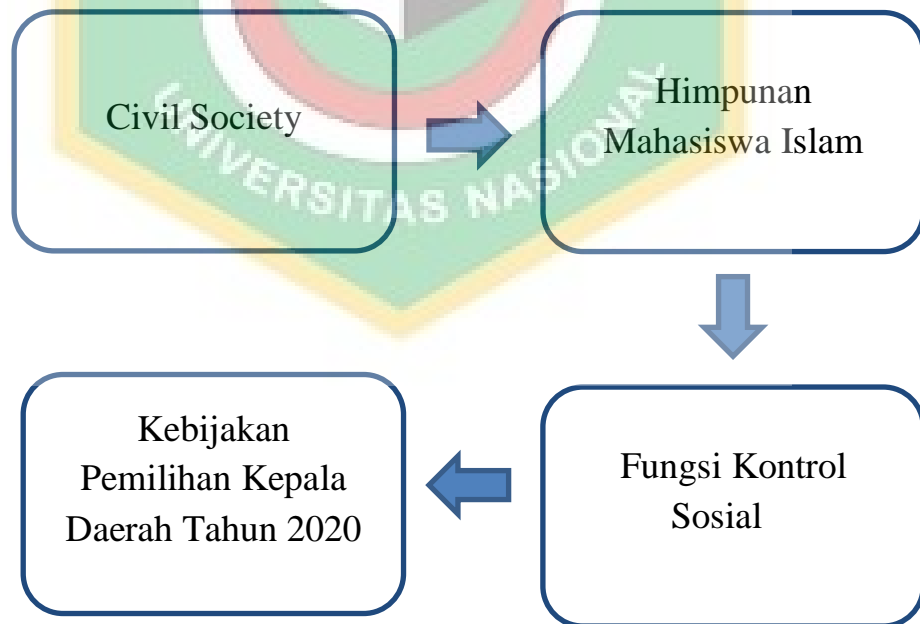
¹¹ Habib cahyono, "Peran Mahasiswa di Masyarakat", Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi, Vol.1, no.1 (2019), hlm 37.

harapan mampu meberikan kritikan, masukan, hingga solusi terkait arah kebijakan pemerintah agar tidak melecneeng dan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya.

4. Penjaga Nilai

Keberagaman agama, suku, kebudayaan, adat istiadat, hingga perbedaan pendapat adalah sesuatu hal yang lazim di Indonesia maka dari itu segenap masyarakat harus mampu menjaga keberagaman tersebut dan menjaga nilai-nilai kesetaraan tanpa adanya perbedaan tak terkecuali mahasiswa harus menjaganya, karena apabila nilai-nilai kesetaraan tersebut diusik maka mahasiswa harus melindunginya untuk menjaga kehidupan masyarakat sipil agar tetap harmonis.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai ketika peneliti melihat begitu aktifnya mahasiswa dalam menyuarakan suaranya melalui kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif yang cukup besar bagi keadaan di sekitarnya, seperti melakukan diskusi-diskusi mahasiswa yang berada di lingkungan kampus sampai kepada dilakukannya aksi demonstrasi untuk mengkritisi suatu hal yang dianggap sudah melenceng dari kesesuaian yang terdapat dalam norma-norma masyarakat maupun telah menyimpang dari tujuan utamanya. Himpunan Mahasiswa Islam sebagai salah satu bagian dari civil society tidak tinggal diam ketika pemerintahan yang seharusnya berorientasi kepada masyarakat justru dalam perjalannya melenceng jauh dari tujuan serta keinginan masyarakat demi terciptanya kesejahteraan, aksi-aksi yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam dapat berupa kegiatan berkompromi dengan pemerintah dan apabila kompromi atau diskusi yang dilakukan berakhir dengan kebuntuan bahkan hasil dari diskusi yang dilakukan tidak dijalankan oleh pemerintah bukan hal yang tidak mungkin aksi demonstrasi lah menjadi salah satu jalannya.

Aksi demonstrasi itu pun dilakukan oleh berbagai macam kalangan mahasiswa dari berbagai kampus dan terdiri dari beberapa organisasi kemahasiswaan, salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang memang dikenal memiliki banyak kader yang tersebar di berbagai kampus di Indonesia. Kader-kader tersebut sangat aktif dalam melakukan kontrol sosial pada pemerintahan dan kehidupan di masyarakat terutama terhadap kondisi sosial yang terjadi dan kepada sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang

apabila kebijakan tersebut dirasa kurang berpihak kepada rakyat maka kader Himpunan Mahasiswa Islam akan melakukan upaya agar sebuah kebijakan tersebut dapat di revisi atau di perbaiki agar menghasilkan sebuah output yang lebih baik.

Dalam anggaran dasar Himpunan Mahasiswa Islam disebutkan bahwa Himpunan Mahasiswa Islam adalah organisasi yang berfungsi sebagai organisasi kader yang mana dapat diartikan Himpunan Mahasiswa Islam melakukan pengkaderan dengan berfokus pada kemajuan intelektual setiap kadernya. Serta peran Himpunan Mahasiswa Islam sebagai organisasi perjuangan yang senantiasa melakukan perjuangan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil makmur di Indonesia.

Peneliti menganalisis tentang bagaimana peran Himpunan Mahasiswa Islam sebagai salah satu bagian dari civil society dalam melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pilkada di tengah pandemi dan jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo pada periode ke dua dan berfokus di tahun 2020 dengan segala macam strategi dan upaya guna mempengaruhi sebuah pemerintahan agar berjalan menjadi lebih baik dari segi kebijakan yang dikeluarkan hingga sistem pemerintahan yang demokrasi dengan bermuara pada kesejahteraan rakyat.